

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

### **A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **1. Geografi Kalimantan Selatan**

Letak astronomis Provinsi Kalimantan Selatan adalah di antara 114° 19' 13" - 116° 33' 28" Bujur Timur dan 1° 21' 49" – 4° 10' 14" Lintang Selatan. Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km<sup>2</sup> atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah tanah basah (*alluvia*) yaitu sebesar 22,76 persen. Pada sepanjang daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/ gambut yang memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi. Sebanyak 74,81 persen wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15 persen dan 31,09 persen wilayah berada di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar. Salah satu adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.

Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (42,99 persen) kemudian padang semak-semak, alang-alang, rumput (22,13 persen). Sekitar 11,63 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan dan 11,35 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk permukiman hanya sekitar 1,59 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,12 persen<sup>1</sup>

## 2. Luas Wilayah Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/ Kota

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kalimantan Selatan  
menurut Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Banjarmasin	72,67	0,19
2	Banjarbaru	328,83	0,88
3	Tanah Laut	3.729,30	9,94
4	Kotabaru	9.422,73	25,10
5	Banjar	4.710,97	12,55
6	Barito Kuala	2.376,22	6,33
7	Tapin	2.174,95	5,79
8	Hulu Sungai Selatan	1.804,94	4,82
9	Hulu Sungai Tengah	1.472,00	3,92
10	Hulu Sungai Utara	951,25	2,53
11	Tabalong	3.599,95	9,59
12	Tanah Bumbu	5.066,96	13,5
13	Balangan	1.819,75	4,85
Kalimantan Selatan		37.530,52	100,00

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Kalimantan Selatan dalam Angka 2014*, Banjarmasin: BPS, h. 3

--	--

Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

### 3. Jumlah Penduduk di Kalimantan Selatan

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk
1	Banjarmasin	656.778
2	Banjarbaru	220.695
3	Tanah Laut	313.725
4	Kotabaru	308.730
5	Banjar	536.328
6	Barito Kuala	289.995
7	Tapin	176.468
8	Hulu Sungai Selatan	232.501
9	Hulu Sungai Tengah	253.868
10	Hulu Sungai Utara	219.210
11	Tabalong	231.718
12	Tanah Bumbu	306.185
13	Balangan	119.171
Kalimantan Selatan		3.854.485

Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

## B. Gambaran Perkembangan Variabel-Variabel yang Diteliti

### 1. Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Maka berikut keterangan mengenai garis kemiskinan yang dijadikan standar dalam pengambilan jumlah penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik.

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

## Teknik penghitungan GKM

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

GKM<sub>j</sub> = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P<sub>jk</sub> = Harga komoditi k di daerah j.

Q<sub>jk</sub> = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V<sub>jk</sub> = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM<sub>j</sub> tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK_j} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{JK}}$$

K<sub>jk</sub> = Kalori dari komoditi k di daerah j

$\overline{HK_j}$  = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

F<sub>j</sub> = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis

komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i x V_i$$

Dimana:

$NF_p$  : Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

$V_i$  : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

$r_i$  : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

$i$  : Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Kemudian metode pemilihan sampel variable kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara *purposive*. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.

Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

Maka berikut jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

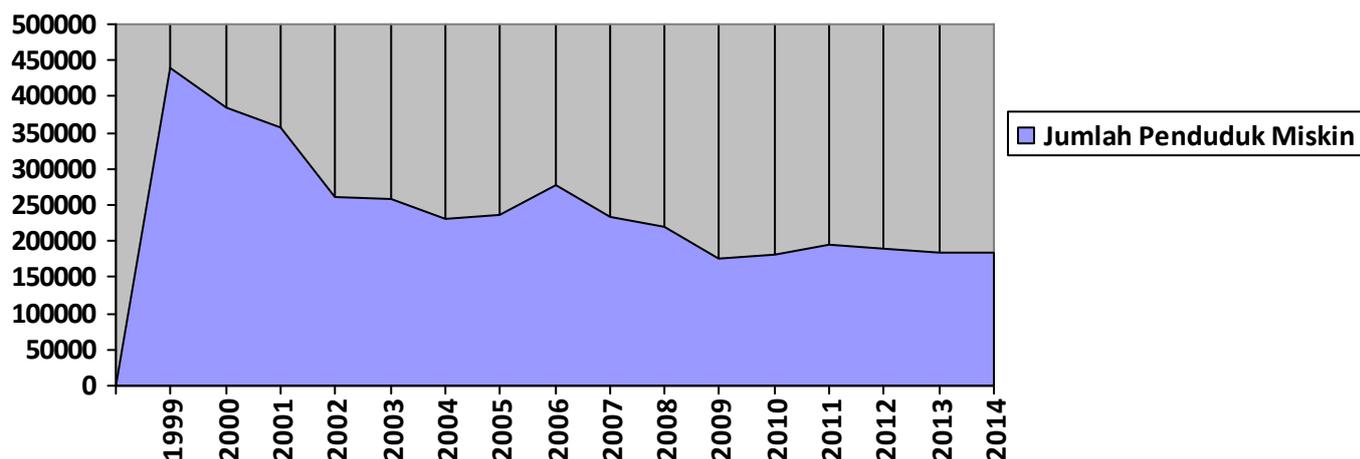
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Selatan

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	1999	440200
2	2000	385300
3	2001	357442
4	2002	259800
5	2003	258960
6	2004	231000
7	2005	235700
8	2006	278451
9	2007	233500
10	2008	218898
11	2009	175977
12	2010	181963
13	2011	194623
14	2012	190597
15	2013	184297
16	2014	182876

Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

## 2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh

sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba;
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah;
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto;
- 4) Perubahan inventori;
- 5) Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Perkembangan PDRB atas harga berlaku di Kalimantan Selatan tahun 1999-2014 dilihat pada tabel di bawah ini.

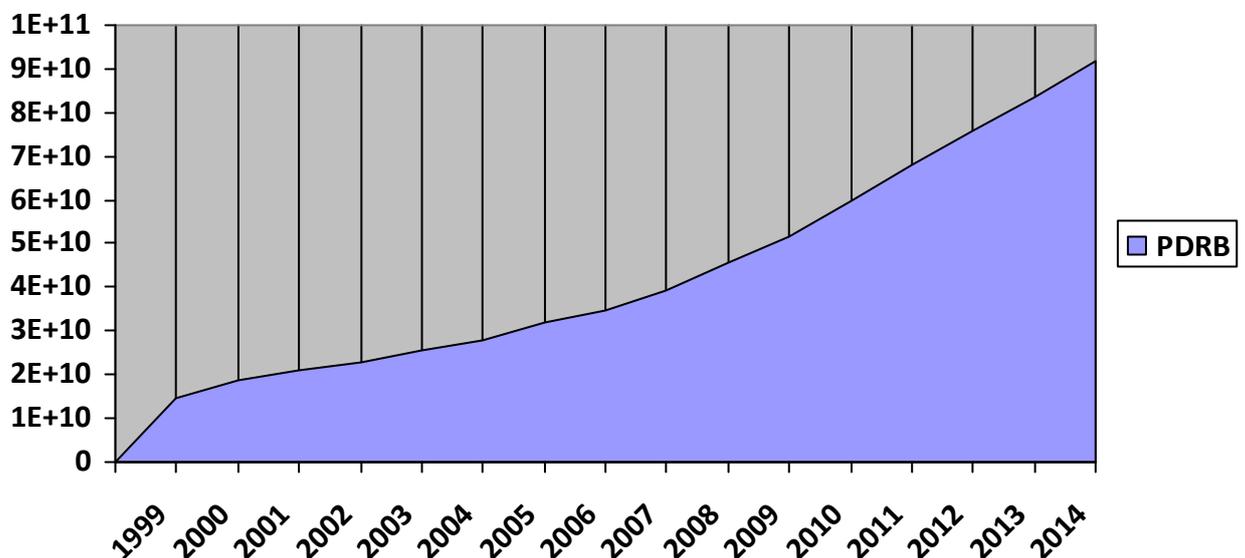
Tabel 4.4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No	Tahun	PDRB	
1	1999	Rp	14.778.175.000.000
2	2000	Rp	18.706.952.690.000
3	2001	Rp	20.858.424.270.000
4	2002	Rp	23.005.521.860.000
5	2003	Rp	25.399.908.280.000
6	2004	Rp	28.028.043.930.000
7	2005	Rp	31.794.068.900.000
8	2006	Rp	34.670.494.290.000
9	2007	Rp	39.438.767.060.000
10	2008	Rp	45.843.793.530.000
11	2009	Rp	51.460.175.700.000
12	2010	Rp	59.821.156.820.000
13	2011	Rp	68.186.882.700.000
14	2012	Rp	75.893.974.020.000
15	2013	Rp	83.361.788.420.000
16	2014	Rp	91.741.891.030.000

Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

Pada tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tren meningkat pada setiap tahunnya. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini.

Grafik 4.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

### 3. Investasi

Investasi diperlukan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin disebabkan karena perlunya investor-investor dari dalam maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan guna penyerapan angkatan kerja serta pembangunan-pembangunan yang bermanfaat.

Strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan tugas pada bidang investasi (penanaman modal) yang dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan pembinaan dunia usaha di arahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama ekonomi.
- b. Mendorong perluasan kerjasama dengan keterkaitan antar sektor dan antar sub sektor, antar usaha skala besar, menengah dan kecil berdasarkan kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
- c. Mengembangkan usaha yang kondusif termasuk penyederhanaan perijinan, penyediaan kemudahan dalam melakukan investasi, pemberian insentif pajak pada dunia usaha yang baru menanamkan investasi, bagi usaha menengah dan kecil dengan memberikan permodalan dan kesempatan berusaha melalui pendidikan dan pelatihan manajemen serta ahli teknologi.
- d. Perlunya menggalakkan penanaman modal dalam masyarakat terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) guna menunjang usaha daerah,

juga Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan dan didorong untuk mendukung pembangunan diberbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan modal dalam negeri.

Kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memacu investasi swasta dengan penataan struktur dunia usaha, meningkatkan daya saing usaha, meningkatkan penyebaran informasi dan penyebaran investasi.
- b. Terciptanya hubungan baik dan saling menguntungkan antar investor dan Pemerintah Daerah.
- c. Meningkatkan SDM baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan.
- e. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
- f. Mempermudah proses perizinan melalui pelaksanaan pelayanan penanaman modal satu pintu (*one stop service*).
- g. Peningkatan informasi penanaman modal untuk media promosi dan kerjasama di bidang investasi.

Maka berikut tabel nilai realisasi investasi di Kalimantan Selatan tahun 1999-2014.

Tabel 4.5 Realisasi Investasi Kalimantan Selatan

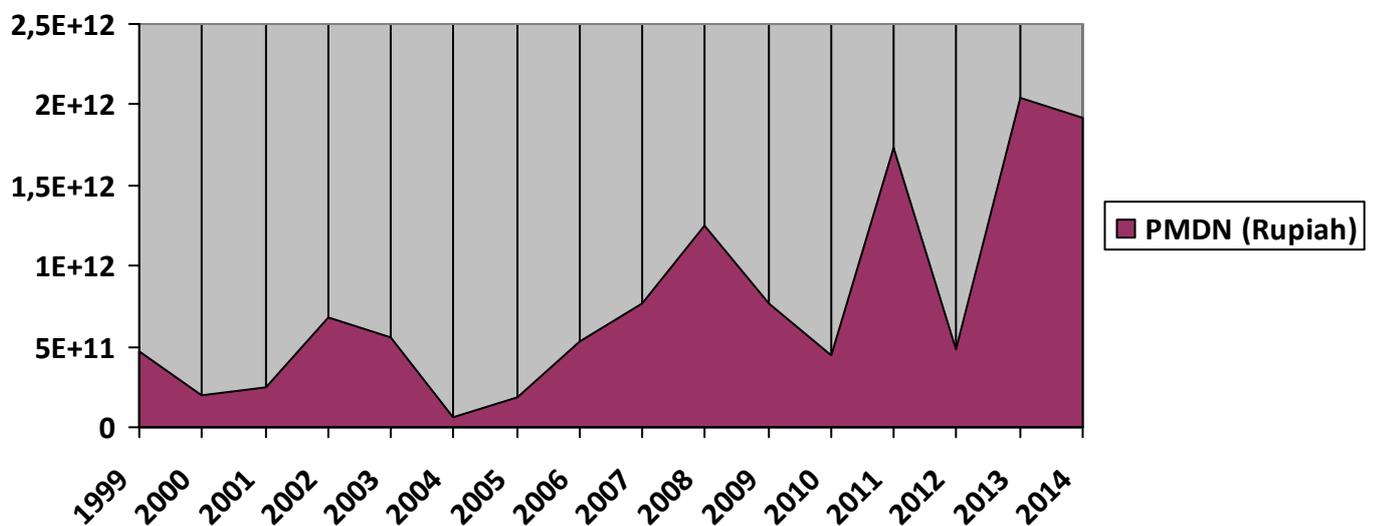
No	Tahun	Realisasi Investasi	
		PMDN (Rupiah)	PMA (US Dollar)

1	1999	Rp. 475.917.910.000	\$ 42.200.000
2	2000	Rp. 194.150.380.000	\$ 24.986.800
3	2001	Rp. 245.954.160.000	\$ 302.189.740
4	2002	Rp. 674.756.370.000	\$ 1.178.700
5	2003	Rp. 562.538.450.000	\$ 157.794.000
6	2004	Rp. 65.900.540.000	\$ 286.130
7	2005	Rp. 189.412.060.000	\$ 87.420.390
8	2006	Rp. 532.906.950.000	\$ 226.337.410
9	2007	Rp. 765.976.600.000	\$ 76.849.690
10	2008	Rp. 1.249.876.810.000	\$ 331.125.930
11	2009	Rp. 773.462.900.000	\$ 177.688.810
12	2010	Rp. 445.643.890.000	\$ 432.879.020
13	2011	Rp. 1.737.543.170.000	\$ 353.220.440
14	2012	Rp. 481.676.610.000	\$ 1.032.024.730
15	2013	Rp. 2.046.964.560.000	\$ 652.191.340
16	2014	Rp. 1.917.967.820.000	\$ 351.986.810

Sumber: BKPM Kalsel Tahun 2014

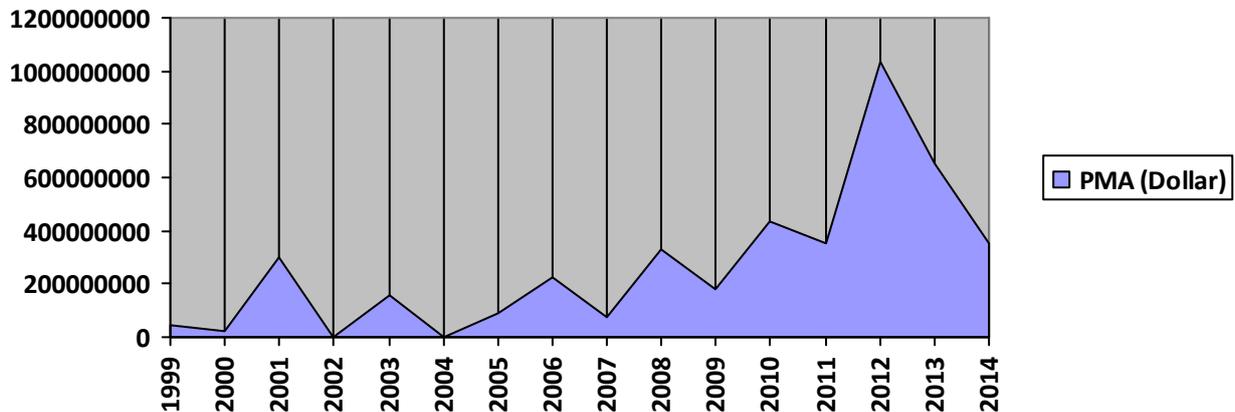
Perkembangan realisasi investasi di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.3 Perkembangan PMDN (Rupiah) Kalimantan Selatan



Sumber: BKPM Kalsel Tahun 2014

Grafik 4.4 Perkembangan PMA (US Dollar) Kalimantan Selatan



Sumber: BKPM Kalsel Tahun 2014

#### 4. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan indikator penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini karena pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya akan menyebabkan semakin bertambah pula angkatan kerja pada tahun-tahun tersebut. Pertumbuhan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan pertumbuhan penduduk berkerja akan memicu kemiskinan. Maka variabel angkatan kerja merupakan variabel yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk usia kerja, yaitu penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Maka penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang

termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sedangkan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Berikut tabel jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan tahun 1999-2014.

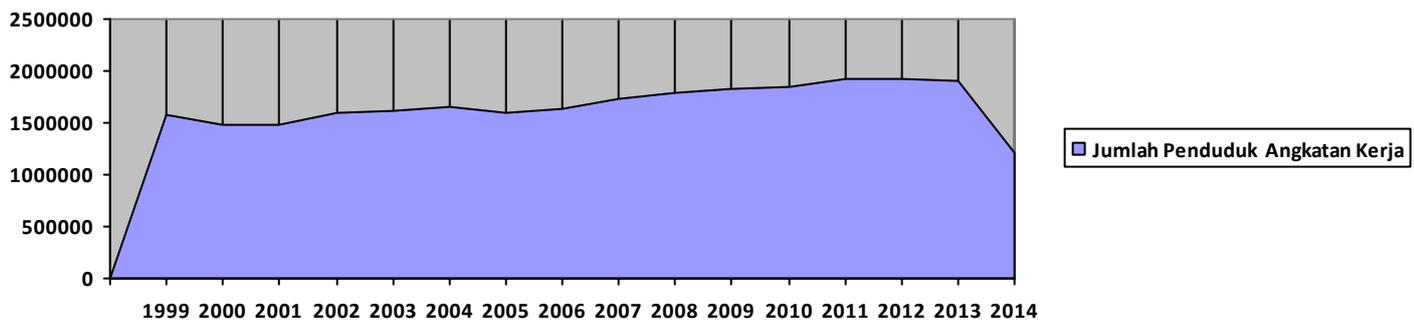
Tabel 4.6 Jumlah Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan

No	Tahun	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
1	1999	1583085
2	2000	1472886
3	2001	1486746
4	2002	1597075
5	2003	1619320
6	2004	1661785
7	2005	1588176
8	2006	1632750
9	2007	1730916
10	2008	1780220
11	2009	1821717
12	2010	1840296
13	2011	1925684
14	2012	1922151
15	2013	1900350
16	2014	1203278

Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam bentuk grafik pada gambar di bawah ini.

Grafik 4.5 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Kalsel Tahun 2014

### C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang didasarkan pada data yang dinyatakan dalam bentuk tabulasi data, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik regresi linier berganda (*linear multiple regression*).

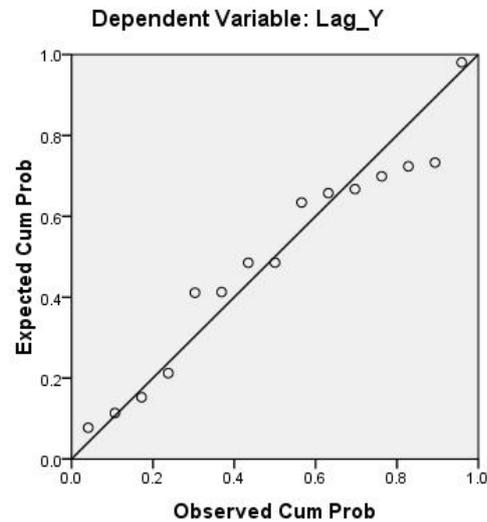
#### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, data terlebih dahulu melewati persyaratan kelayakan data dengan menggunakan uji asumsi klasik, yaitu sebagai berikut:

##### a. Uji Normalitas

Gambar 4.1 *Plot Normal Distribution*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai tolerance  $> 0,10$  dan perhitungan VIF juga memiliki nilai  $< 10$ , berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 4.7 Nilai *Tolerance* dan VIF

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PDRB	.171	5.852
	Investasi	.161	6.224

Angkatan Kerja	.856	1.168
----------------	------	-------

a. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

c. Uji Autokorelasi

Nilai statistik Durbin Watson (D-W) sebesar 1,455. Tabel D-W menunjukkan dL dan dU masing-masing untuk  $k = 3$  dan  $n = 16$ ,  $\alpha = 0,05$  adalah 0,857 dan 1.728. Berarti  $dU < DW < 4 - dU$  ( $0.857 < 1,455 < 2.272$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.7 Nilai Statistik Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 <sup>a</sup>	.727	.652	.59422	<b>1.455</b>

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

## D. Analisis Regresi Linier Berganda

### 1. Persamaan Regresi

Tabel 4.8 Nilai Koefisien Regresi untuk PDRB, Realisasi Investasi dan Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.139	.154		.901	.387
PDRB	-1.286	.392	-1.250	-3.280	.007
Investasi	.376	.236	.626	1.594	.139

Angkatan Kerja	-0.340	.167	-0.347	-2.036	.067
----------------	--------	------	--------	--------	------

a. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,139 - 1,286 X_1 + 0,376X_2 - 0,340X_3$$

$$\text{Kemiskinan} = 0.139 - 1,286 \text{ PDRB} + 0,376 \text{ Investasi} - 0,340 \text{ Angkatan}$$

Kerja.

Keterangan:

- a. Konstanta sebesar 0,139 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka kemiskinan sebesar 0,139.
- b. 1 sebesar -1,286 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 % akan diikuti penurunan jumlah kemiskinan sebesar 1,286 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. 2 sebesar 0,376 menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi 1 % akan diikuti kenaikan kemiskinan sebesar 0,376 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. 3 sebesar -0,340 menunjukkan bahwa setiap kenaikan angkatan kerja sebesar 1 % akan diikuti penurunan kemiskinan sebesar 0,340 dengan asumsi variabel lain tetap.

## 2. Analisis Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,853 berarti korelasi antara kemiskinan dengan variabel independennya (PDRB, investasi, dan angkatan kerja, dan lain-lain PAD) sangat kuat karena lebih dari 0,5. R

square atau koefisien korelasi sebesar 0,727 berarti 72,7% variasi atau perubahan dalam kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dari PDRB, Investasi dan angkatan kerja, sedangkan sisanya 27.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Tabel 4.9 Koefisien Korelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.853 <sup>a</sup>	.727	.652	.59422

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji T (T-Test)

Tabel 4.10 Nilai T-Hitung Terhadap Jumlah Kemiskinan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.139	.154		.901	.387
	PDRB	-1.286	.392	-1.250	-3.280	.007
	Investasi	.376	.236	.626	1.594	.139
	Angkatan Kerja	-.340	.167	-.347	-2.036	.067

a. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan :

- a. Signifikansi variabel PDRB menunjukkan angka  $0,007 < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, artinya PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan.
  - b. Signifikansi variabel Investasi menunjukkan angka  $0,139 > 0,05$ ,  $H_0$  diterima yang artinya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan.
  - c. Signifikansi variabel angkatan kerja menunjukkan angka  $0,067 > 0,05$ ,  $H_0$  diterima yang artinya angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan.
- b. Uji F (*F-Test*)

Tabel 4.11 Nilai F-Hitung terhadap Jumlah Kemiskinan

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.338	3	3.446	9.759	.002 <sup>a</sup>
	Residual	3.884	11	.353		
	Total	14.222	14			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Lag\_Y

Sumber: Data yang Diolah Tahun 2014

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PDRB, investasi dan angkatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan karena nilai signifikansi penelitian kurang dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ).